



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UNIT KERJA : UNSUR PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MIKRON ANTARIKSA
2. Jabatan : KEPALA PELAKSANA
3. NHK : 141524

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 215.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m²/45 m² di KAB / KOTA BANGKA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 300 m² di KAB / KOTA BANGKA, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 146.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
2. MOBIL, CRV MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 28.000.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 109.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 498.000.000**III. HUTANG** Rp. 100.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 398.000.000**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.